

## ABSTRAK

**Ahmad Fahmi Fahrurrozi (2023): Penelitian Ini Berjudul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peranan BPD Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung”.**

Masa pandemi Covid-19 telah membuat aktivitas manusia menjadi lumpuh, sehingga pelayanan birokrasi pun menjadi kurang optimal, begitupun pada BPD Desa Pinggirsari yang juga tugas fungsinya terganggu oleh pandemic, lalu dengan adanya Peraturan Daerah Kab. Bandung No. 12/2018 perubahan atas Perda Kab. Bandung No. 22/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas untuk mengawasi perkembangan desa dan memaksimalkan potensi dari tersebut. Atas dari wewenang BPD tersebut maka dengan ini peneliti menganggap perlu untuk mengkaji penerapan Perda Kab. Bandung No. 12/2018 tentang BPD di desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung pada masa pandemic.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau permasalahan : 1) Pelaksanaan Tugas dan fungsi BPD Selama Pandemi covid-19 2) Dampak Pandemi covid-19 terhadap proses pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD Desa Pinggirsari kecamatan Arjasari selama Pandemi Covid-19

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi, otonomi daerah dan Badan Permusyawaratan Desa dan teori siyasah Dusturiyah dalam konsep kemaslahatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasian hukum normatif pada setiap kejadian yang di masyarakat. Sumber data diperoleh wawancara, observasi dan informan. Data primer berasal langsung dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat atau pelaku langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, studi dokumen. Teknik analisis data dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Tugas dan fungsi BPD tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Walaupun ada beberapa point yang tidak bisa dilaksanakan seperti tidak terselenggarakannya perancangan peraturan desa pada saat pandemi covid-19 melanda dunia. 2) Dampak adanya Pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap proses pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD sangat yang biasanya dilakukan secara langsung dan tanpa terbatas. Maka pada saat pandemi melanda proses menampung aspirasi masyarakat, pengawasan kinerja kepala desapun berubah secara signifikan yang biasanya dilakukan secara langsung tapi diubah secara online atau terbatas 3) tinjauan dari siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang tugas fungsi BPD perlu di optimalkan agar melahirkan pemerintahan desa yang bisa mengeluarkan kebijakan dengan mengedepankan kemaslahatan umat.

**Kata Kunci** : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan daerah dan *Siyasah Dusturiyah*